



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 29 Maret 2021/Periodik - 2020)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN LUWU
UNIT KERJA : PIMPINAN TERTINGGI

I. DATA PRIBADI

1. Nama : H. BASMIN MATTAYANG
2. Jabatan : BUPATI
3. NHK : 401275

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN

Rp. 984.030.000

1. Tanah Seluas 125 m2 di KAB / KOTA LUWU, HASIL SENDIRI Rp. 50.000.000
2. Tanah Seluas 10000 m2 di KAB / KOTA LUWU, HASIL SENDIRI Rp. 15.000.000
3. Tanah Seluas 4000 m2 di KAB / KOTA LUWU, HASIL SENDIRI Rp. 30.000.000
4. Tanah Seluas 16500 m2 di KAB / KOTA LUWU, HASIL SENDIRI Rp. 25.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 1635 m2/168 m2 di KAB / KOTA LUWU, HASIL SENDIRI Rp. 234.030.000
6. Tanah Seluas 2000 m2 di KAB / KOTA LUWU, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000
7. Tanah Seluas 200 m2 di KAB / KOTA KOTA MAKASSAR , HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000
8. Tanah Seluas 346 m2 di KAB / KOTA KOTA MAKASSAR , HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000
9. Tanah Seluas 3200 m2 di KAB / KOTA LUWU, HASIL SENDIRI Rp. 130.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 200.000.000

1. MOBIL, MAZDA MINI BUS Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp. 126.000.000



D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	35.000.000
F. HARTA LAINNYA	Rp.	3.100.750.000
Sub Total	Rp.	4.445.780.000
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	4.445.780.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.